

## KSAL Masih Kaji Pemindahan Markas Koarmada I ke Riau

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono hingga kini masih mengkaji mengenai pemindahan Markas Komando Armada I (Koarmada I) dari Jakarta ke Kepulauan Riau.

Yudo menjelaskan, rencana pemindahan ini berkaitan dengan wilayah trouble spot Koarmada I, yakni yang berada di Natuna, Selat Malaka, Selat Singapura, maupun di perbatasan dengan India.

"Dengan daerah operasi yang menjadi prioritas itu tentunya akan lebih efektif apabila Koarmada I berada di wilayah Kepulauan Riau sehingga pas di tengahnya kan," kata Yudo kepada wartawan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Rabu (2/2).

Yudo mengatakan, di Kepulauan Riau, terdapat Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV/Tanjungpinang. Di lokasi ini sudah mempunyai sarana dan prasarana. Kondisi ini pun membuat syarat pemindahan terpenuhi.

Kendati demikian, kata Yudo, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Markas

Koarmada I berpindah dari Jakarta ke Kepulauan Riau.

"Jadi untuk Koarmada I tidak harus pindah, tidak harus pindah. Ketentuannya tidak ada untuk harus pindah," ujarnya.

"Namun demikian, tentunya Koarmada (I) ini kan harus bisa mengantisipasi perkembangan situasi atau trouble spot yang terjadi di wilayah perairan Indonesia ini," katanya.

Yudo mengatakan, pemindahan Markas Koarmada I akan melalui kajian yang panjang. Mengingat, untuk mendirikan Markas Koarmada I membutuhkan biaya yang besar, termasuk melaksanakan pergeseran material dan personel yang besar. Hal itu serupa layaknya TNI AL mendirikan Koarmada baru.

"Pendirian Armada juga tidak bisa dalam setahun, dua tahun, bisa bertahap," ujarnya.

"Namun demikian, untuk efektif, efisien memang yang efektif di sana karena daerah operasinya lebih dekat sehingga efektifnya sewaktu digerakkan kapal akan lebih cepat di banding dari Jakarta," katanya. ● han

## Suami Anggota DPRD Batanghari Adalah Pecatan Polisi, Ditangkap saat Nyabu

JAMBI (IM) - Ditesnarkoba Polda Jambi menangkap JN (41) warga Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, saat menikmati narkoba jenis sabu. JN yang diketahui meruoakan suami anggota DPRD Batanghari ternyata pecatan dari anggota polisi.

Dirresnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru mengakui bahwa pelaku yang ditangkap merupakan pecatan polisi dari wilayah hukum Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2014.

"Ya sewaktu dalam pemeriksaan penyidik oleh Opsnal Subdit 1 Ditesnarkoba Polda Jambi, Junaidi mengaku pecatan polisi Sumbar yang sebelumnya berpangkat Brigadir," tandasnya,

Rabu (2/2).

Thomas menambahkan, pecatan polisi yang ditangkap juga merupakan suami dari anggota DPRD Kabupaten Batanghari bernama Aminah.

"Saat diamankan di rumahnya, JN mengaku sudah menelan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200 ribu per paket dan saat diperiksa anggota," tuturnya.

Selanjutnya oleh petugas, pelaku langsung dibawa ke rumah sakit Muarabulian untuk mengambil barang bukti. Diakuinya, pelaku diamankan setelah adanya laporan masyarakat bahwa wilayah Kelurahan Sridadi sering terjadi transaksi narkoba.

"Saat ini, kita masih mencari inisial A yang merupakan penjual narkoba ke JN," tandas Thomas. ● mei

## Yasonna: UU Narkotika Perlu Direvisi Agar Tidak Memberikan Multitafsir

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan, Undang-Undang Narkotika perlu direvisi agar tidak memberikan multitafsir dalam penjatuhannya hukuman bagi pengguna, kurir, maupun bandar narkoba.

Yasonna mengatakan, dalam praktiknya saat ini, banyak pengguna narkoba yang justru dihukum berat selayaknya bandar narkoba, begitu pun sebaliknya, bandar narkoba justru mendapat hukuman yang tidak begitu berat.

"Di Undang-Undang Narkotika nanti memang tidak boleh ada tafsiran yang sangat luwes. Saya harus mengatakan ini, ada bandar yang dipemakaian, ada pemakai yang dibandarkan," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (2/2).

Yasonna menyebutkan, dalam UU Narkotika yang berlaku sekarang, ada multitafsir antara pemakai dan kurir narkoba. Menurut Yasonna, hal itu membuat hanya pemakai narkoba yang mampu menyewa pengacara yang bisa lolos dari jerat hukuman sebagai kurir narkoba.

"Karena banyak di antara pemakai-pemakai ini adalah orang-orang yang boleh kita katakan secara ekonomi sangat lemah," ujar Yasonna.

Menurutnya, banyaknya pemakai narkoba yang dihukum penjara juga menyebabkan masalah baru, salah satu

nya lembaga pemasyarakatan jadi kelebihan penghuni.

"Aneh satu jenis crime (jumlahnya) mendominasi lebih 50 persen dibandingkan semua total crime, berarti ada yang salah, pasti ada yang salah, yang salah itu kita koreksi," katanya.

Hukuman penjara bagi pemakai narkoba juga dapat membuat penjara tak ubahnya pasar peredaran narkoba karena pemakai, kurir, maupun bandar narkoba dikumpulkan di satu tempat. "Maka pemakainya yang harus dihilangkan, bandarnya dimiskinkan melalui TPPU. Nanti mungkin usulnya di UU Narkotika itu memang harus dimiskinkan melalui TPPU, tidak boleh tidak supaya ada efek jeranya," kata Yasonna menambahkan.

Yasonna sebelumnya mengatakan, pemerintah akan segera membahas revisi UU Narkotika dengan DPR. Yasonna menyebutkan, pada November 2021 ia telah beritahu kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi UU Narkotika.

Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.

"Kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kita bahas dengan Komisi III karena menurut hemat kami revisi Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk kita segerakan," kata Yasonna.

● han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## KSAL PIMPIN SERTIJAB ENAM JABATAN STRATEGIS TNI AL

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kiri) berfoto bersama Laksamana Madya TNI Agung Prasatiawan (kiri), Laksamana Madya TNI Nurhidayat (kedua kiri), Mayjen TNI (Mar) Suhartono (ketiga kanan), Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah (kedua kanan) dan Laksamana Muda TNI Denih Hendrata (kanan) saat upacara Serah Terima Jabatan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Rabu (2/2). Laksamana TNI Yudo Margono memimpin serah terima jabatan enam jabatan strategis TNI AL antara lain Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal), Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatl), Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI AL (Kadispotmaral), Kepala Dinas Psikologi TNI AL (Kadispsial) dan Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AL (Kadisbintal).

# Ombudsman Luncurkan Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa Ombudsman mengusung konsep borderless agar pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui Website Resmi Ombudsman RI.

JAKARTA (IM) - Ombudsman Republik Indonesia meluncurkan aplikasi pengaduan

terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini akan mempermudah masyarakat

melaporkan dugaan maladministrasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, kewenangan yang dimiliki Ombudsman harus difungsikan dan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa karena APBN yang terserap pada kegiatan itu dinilai cukup besar.

"Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kerap kali dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang atas tugas atau jabatan yang berujung pada korupsi," ujar Yeka dalam sambutannya, Rabu (2/2).

Yeka menyampaikan, jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman terkait pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 118 laporan, baik di pusat maupun perwakilan. Dari jumlah itu, sebanyak 53 ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan.

Ia mengatakan, sebanyak 21 laporan yang masuk terkait dengan tidak diberikan layanan saat menyampaikan keberatan, baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Inspektoral.

Oleh sebab itu, Ombudsman hadir untuk menciptakan iklim pegelolaan keuangan negara yang sehat atas permasalahan yang timbul pada Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi pengaduan.

"Dengan diluncurkannya aplikasi ini, diharapkan dapat mempercepat laporan atas maladministrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah," kata Yeka.

"Ombudsman serius menangani laporan barang dan jasa ini karena potensi kebocoran yang negara ada banyak di sini. Sehingga kedepan keuangan negara dapat

lebih hemat," ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto menyampaikan, aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa Ombudsman itu mengusung konsep borderless.

Konsep borderless bertujuan agar pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui Website Resmi Ombudsman RI submenu Pengaduan. Pengaduan itu juga bisa dilakukan melalui aplikasi Radius pada submenu Ombudsman RI sebagai pilot project kolaborasi Ombudsman RI dengan aplikasi non-komersial.

"Sistem Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini akan memudahkan pelapor melalui metode sistem formulir langkah-perlangkah (Wizard Form) yang telah didesain untuk meningkatkan daya komunikasi, kelengkapan data, dan kesesuaian penyampaian aduan," papar Patnuaji.

Patnuaji menjelaskan, Setiap aduan yang masih membutuhkan tanggapan persyaratan lain seperti data tambahan formulir maupun materiil dapat dikomunikasikan secara sistem melalui email kepada pelapor.

"Sehingga diharapkan akan memudahkan proses komunikasi dan pengarsipan dari setiap materi unggahan pelengkap aduan yang disampaikan," katanya. ● mei



## RAKER MENKUMHAM DENGAN KOMISI III DPR

Menkumham Yasonna H. Laoly memberikan paparannya saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). Raker tersebut beragenda mendengarkan penjelasan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata.

# Dua Lapis "Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah tengah membangun dua buah lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan maksimum di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

Dua lapis tersebut akan dihuni para narapidana berisiko tinggi, yakni narapidana kasus terorisme dan bandar narkoba.

"Nanti yang dua ini dapat kami gunakan untuk tempat bagi narapidana-narapidana berkategori high risk, maka bandar dan teroris akan kami pindahkan ke Nusa Kambangan sesuai kapasitas yang tersedia," kata Yasonna

dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (2/2).

Yasonna menyebutkan, selain dua lapis dengan kategori maximum security itu, pemerintah juga tengah membangun satu lapis medium security di Nusakambangan.

Sepanjang tahun lalu, Kemenkumham juga telah memindahkan 329 orang narapidana kategori risiko tinggi ke Nusakambangan. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Yasonna juga menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan kapasitas hunian lapis untuk 138.044 orang.

Sebagai upaya penanga-

nan terhadap kondisi lapas yang jumlah penghuni melampaui daya tampung, Yasonna mengatakan, pihaknya telah melakukan asimilasi di rumah bagi 58.708 orang dan membangun unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan tambahan kapasitas 2.818 orang.

"Kami juga mengadakan kebijakan redistribusi pemindahan napi tahun 2021 sebanyak 61.000 orang dari daerah padat yang overkapasitas ke daerah yang tidak overkapasitas," ujar Yasonna.

Ia menambahkan, pihaknya rutin melakukan razia mandiri dan razia gabungan dengan TNI/Polri untuk mencegah masuknya barang ilegal ke lapas dan rumah tahanan. "Sudah ada terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang sebanyak 101 kali," kata. ● mci

## Tolak UU IKN, PKS Sebut Cacat Formil dan Materiil serta Serampangan

JAKARTA (IM) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul membeberkan sejumlah alasan yang membuat partai tersebut menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Syaikhul mengatakan, PKS menolak karena UU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun materiil atau substansial.

"PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, secara ugah-ugalan, secara serampangan dan secara asal-asal," ujar Syaikhul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2022 pada Rabu (2/2).

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya bersikap tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota. Presiden dan pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan itu. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi serta saran kepada pemerintah.

Jika pemerintah memaksakan kehendak tanpa

mempertimbangkan masukan masyarakat, dikhawatirkan kebijakan yang dibuat justru tidak bijak.

"Ini bukan sekadar properti, proyek properti, tetapi ini adalah mega proyek pembangunan peradaban bangsa," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dalam pemindahan ibu kota, menurut Syaikhul, seluruh variabel penyertanya harus diperhitungkan. Mulai dari dampak ekonomi, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dampak terhadap lingkungan.

Menurutnya, sederet dampak inilah yang seharusnya diperhitungkan dengan matang dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota.

"Banyak variabel yang harus dipertimbangkan, terlebih lagi kita hari ini masih sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19," ungkap Syaikhul.

Fraksi PKS DPR menolak RUU IKN untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna. Penolakan itu dibacakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purana dalam rapat Pansus IKN, Selasa (18/1) dini hari.

Suryadi mengungkapkan, alasan pihaknya menolak RUU IKN lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum terkomodasi dalam RUU tersebut.

"Maka Fraksi PKS DPR RI, dengan mengucapakan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Suryadi, Selasa (1/2). ● han

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT SUMBER AGRO CEMERLANG**

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Sumber Agro Cemerlang, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") No.: 34 tanggal 24 Januari 2022, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Maureen Henriette Windy selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

**PT SUMBER AGRO CEMERLANG**  
Grha Baramulti Lt. 3  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,  
Likuidator  
Maureen Henriette Windy

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT WAHANA AGRO CEMERLANG**

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Wahana Agro Cemerlang, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") No.: 37 tanggal 24 Januari 2022, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Maureen Henriette Windy selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

**PT WAHANA AGRO CEMERLANG**  
Grha Baramulti Lt. 3  
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,  
Likuidator  
Maureen Henriette Windy

**POWER AUCTION LELANG OTOMOTIF TERBUKA UNTUK UMUM**

PT. POWER ASEINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukuella atas barang bergerak berupa RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR yang terdiri dari berbagai merk dan tipe, pada :

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	SYARAT & KETENTUAN UMUM :
Selasa - Rabu, 08 - 09 Februari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 10 Februari 2022	11.00 s/d Selesai	1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar : - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPI, MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPI, MOTOR
Selasa - Rabu, 15 - 16 Februari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 17 Februari 2022	11.00 s/d Selesai	2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ("as is")
Minggu - Senin, 20 - 21 Februari 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Selasa, 22 Februari 2022	11.00 s/d Selesai	3. Uang jaminan dan pelunasan diotorikan ke rekening a/n PT. Power Aseindo Selaras A/C no. 5710999971 di BCA cab. Kyal Carrigin, Jakarta Pusat

4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan menang dan uang jaminan akan hangus  
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Aseindo Selaras, telepon 0812 1217 1861 (Wali) atau melalui email : yudi.darmawan@power-auction.id

**LOKASI OPEN HOUSE & LELANG**  
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Jakarta, 3 Februari 2022  
PANITIA LELANG